



A Tarwanto

## Angkat Citra Satpol PP Lewat Kompetensi, Profesionalitas, Serta Perbaiki Kesejahteraan

Pelaksanaan peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke-57 dilaksanakan meriah di beberapa daerah. Hari ulang tahun Satpol PP yang jatuh pada tanggal 3 Maret setiap tahunnya, meski dirayakan tidak dalam waktu bersamaan diberbagai daerah, tetap tidak menghilangkan arti penting dari perayaan HUT Satpol PP tersebut.

**D**I Jawa Timur, misalnya Gubernur H Imam Utomo, pada (2/3) yang lalu mengikuti gelaran jalan sehat memperingati hari ulang tahun Satpol PP yang mengambil rute perjalanan sepanjang 5 Km. Usai acara gerak jalan, dilangsungkan penyerahan hadiah, hiburan, donor darah dan bhakti sosial, yang diikuti tidak hanya oleh Satpol PP di lingkungan Pemprov Jatim, namun juga oleh seluruh PNS di lingkungan Pemda Jati.

Sementara itu, peringatan hari jadi Satpol PP yang dilangsungkan di Sumatera Barat (Sumbar), pada (5/3) dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar Gamawan Fauzie. Pada peringatan HUT Pol PP tahun ini, khusus untuk Sumatera Barat dipusatkan di halaman Kantor Bupati Pasaman. Dalam amanat Mendagri yang dibacakannya, Mendagri berpesan bahwa sebagai anggota Satpol PP harus mendukung kebijakan penyelenggaraan pemerintah, mensosialisasikan kepada masyarakat secara arif dan bijaksana, serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam pelaksanaan tugas.

Lebih lanjut disebutkan, anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas hendaknya bersikap dan bertindak secara profesional, dengan mengedepankan kearifan dalam bertindak sesuai koridor hukum dan nilai-nilai moral serta memperhatikan hak azasi manusia, jelasnya.

Di beberapa daerah lainnya, termasuk di DKI Jakarta, perayaan HUT Satpol PP juga berlangsung meriah dan

khidmat. Namun, hampir seragam, pelaksanaan peringatan HUT Satpol PP tersebut juga diisi dengan kegiatan hiburan, donor darah serta bhakti sosial.

### Menegakkan Perda

Sementara itu, terkait hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ke-57, Direktur Trantib dan Linmas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) Depdagri, A Tarwanto yang dijumpai *Media Praja* di ruang kerjanya, Jumat (2/3) menyatakan seiring dengan perkembangan zaman, maka Satpol PP tidak lagi hanya menangani tugas administratif, melainkan juga tugas operasional dan menegakkan peraturan daerah sesuai petunjuk teknis daerahnya masing-masing.

Dijelaskannya, semenjak masa kemerdekaan Polisi Pamong Praja sudah eksis, terutama saat mulai berlakunya UU tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut mengalami pergantian mencapai enam kali, dimulai dari UU No 22 tahun 1948 sampai UU Nomor 22 tahun 2004. Perubahan nama pun terjadi. Terakhir satuan berbaju biru dongker milik Pemda ini, dicetuskan dengan Surat Keputusan Mendagri No 32/2/21 tanggal 3 Maret tahun 1950 yang resmi menggunakan nama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Hingga saat ini, Polisi Pamong Praja sudah 57 tahun mendarmabaktikan pengabdianya kepada bangsa dan negara," kata mantan Kapuspen Depdagri ini

sambil menjelaskan pada masa lalu tugas Satpol PP lebih banyak menangani tugas administratif. Namun, akhirnya tugas pamong praja ini berubah yaitu juga turut menegakkan peraturan-peraturan daerahnya.

"Setidaknya saat ini, tugas Satpol PP menegakkan peraturan daerah, serta menegakkan keputusan kepala daerah," kata lelaki yang baru saja menduduki jabatannya ini. Pelaksanaan tugas operasional dan menegakkan peraturan daerah sesuai petunjuk teknis daerahnya masing-masing. Petunjuk teknis petugasan Satpol PP, dibuat oleh kepala daerahnya masing-masing untuk dilaksanakan. Sementara bagi pembinaannya sendiri dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Ditambahkannya, bahwa pemerintahan bisa berjalan dengan baik jika peraturan daerah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Sudah menjadi tugas dan kewajiban satuan ini untuk melihat dan mengawasi peraturan daerah dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Oleh sebab itu, menurut Tarwanto tugas Satpol PP sangatlah berat dan mulia.

Diakuinya, akhir-akhir ini ada pandangan miring yang diarahkan masyarakat terhadap satuan ini. Hal ini terutama karena ekses pelaksanaan tugas Satpol PP bagi penegakan peraturan adalah sebuah proses. Terkait hal itu, dia menganalisis hal tersebut terjadi karena kedua belah pihak, baik anggota Satpol PP maupun masyarakat, menyalahi aturan yang sudah ditetapkan.

Jika kedua kepentingan antara Satpol PP dalam menegakkan hukum sesuai peraturan daerah yang telah ditetapkan kepala daerah dan masyarakat yang mempertahankan pandangan dan keinginannya, maka besar kemungkinan menyebabkan eksekusi yang terjadi di lapangan, berupa bentrokan dan benturan yang belakangan sering terjadi.

Menurutnya, peraturan daerah di satu pihak dibuat bagi kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah agar dapat bersinergi dan menghasilkan ketertiban dalam masyarakat. Sementara Pol PP merupakan sebuah elemen bagi penegakan hukumnya. Di pihak lain, ada anggota masyarakat yang melanggar perda tersebut sehingga menciptakan situasi yang tidak tertib. Dicontohkannya, trotoar yang saat ini banyak digunakan untuk berdagang, padahal trotoar diperuntukkan bagi hak pejalan kaki.

Padahal kenyataan dilapangan, upaya bertahap dalam melaksanakan eksekusi termasuk penegakan hukum oleh Pol PP biasanya sudah dilakukan. Mulai melalui himbauan yang sangat persuasif, tertulis sampai pada tindakan tegas dalam upaya penertiban pada anggota masyarakat yang membandel.

### Dibekali pengetahuan dan norma

Untuk membantu para polisi pamong praja dapat menjalankan tugasnya tanpa kekerasan fisik, Tarwanto menerangkan setiap anggota Satpol PP dibekali dengan norma dan kode etik serta pengetahuan tentang HAM. Tidak hanya itu, ditambahkan lelaki berlogat Jawa ini, dalam norma etika tersebut disebutkan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya selalu mengutamakan upaya mengayomi masyarakat. "Jangan lupa, di setiap saku baju petugas Pol PP selalu terselip sebuah buku saku tentang Hak Asasi Manusia. Ini penting agar mereka selalu ingat dan tidak melanggar HAM," kata Tarwanto sembari menyodorkan buku HAM berwarna coklat dari saku bajunya.

Pihaknya menurut Tarwanto, tengah berupaya mengangkat citra Satpol PP yang belakangan mendapat sorotan miring dari masyarakat, termasuk meminimalisir eksekusi dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP. Upaya tersebut diantaranya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya tugas Pol PP, melalui berbagai media.

Tarwanto juga meyakinkan, bahwa

pihaknya akan bekerjasama dengan media guna memberi informasi yang *pas*, sehingga pemberitaan terkait Pol PP akan seimbang, "Agar tidak lagi Pol PP selalu dianggap pelanggar HAM, padahal prosedur teknis penegakan hukum di daerah sudah benar dilakukan," tambahnya

Disamping itu, pihaknya juga berupaya meningkatkan kompetensi para aparatur Pol PP, melalui bimbingan teknis terkait pengetahuan hukum dan perundang-undangan. Hal ini penting, karena Satpol PP juga selaku pengawas pelaksanaan Peraturan daerah.

Pihaknya juga secara periodik mengupayakan bimbingan teknis (bintek) terkait sikap dan mental aparat Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, terutama seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2005, mengenai Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satpol PP.

"Terkait bimbingan teknis itu kami akan melakukannya dengan membagi-bagi daerah sesuai regionalnya secara periodik untuk diberikan arahan bintek tersebut," tambahnya.

Tidak kalah pentingnya menurut Tarwanto, di dalam rekrutmen bagi anggota Satpol PP Pemda harus mengindahkan aturan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 yang mengatur bahwa seseorang yang dapat diangkat menjadi PNS di lingkungan Satpol PP minimal berijazah SLTA.

### Tingkatkan status pendidikan

Dikeluhkannya, dari data yang ada masih banyak hasil rekrutmen meloloskan anggota Satpol PP yang berijazah SD. "Dengan potensi yang demikian, hanya tamat SD jika dihubungkan dengan tanggungjawab penegakan peraturan daerah dan kepala daerah. Bagaimana ini?," keluhnya. Apalagi jika dihubungkan dengan kondisi dan perkembangan zaman sekarang ini serta luasnya dinamika dan spektrum permasalahan, idealnya seorang Pamong Praja, memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana muda, sehingga akan mudah di *up grade* pengetahuannya.

"Dengan bekal kompetensi yang seharusnya maka dapat diharapkan pelaksanaan tugas Pol PP dapat lebih baik dan simpatik, *nonsens* jika filosofi pemerintahan daerah yang begitu besar dapat didukung dengan Satpol PP yang

berkemampuan dan kompetensi yang pas-pasan," tambahnya lagi.

Satpol PP saat ini didukung oleh 36.263 personil tersebar di seluruh pemerintah daerah, 15546 dari jumlah anggota Satpol PP tersebut sudah berstatus sebagai PNS dan sisanya dengan jumlah yang lebih besar, 19348 masih berstatus honorer. Sedangkan dari total jumlah 36.263 personil Pol PP itu, 1369 orang diantaranya sudah menjadi PPNS.

Tarwanto tampak prihatin, karena sebagai petugas yang mengamankan Perda, masih ada petugas Pol PP yang berstatus honorer. "Inilah tantangan ke depannya. Bagaimana meningkatkan status kepegawaian anggota Pol PP," ujarnya singkat.

Masih pada komposisi Satpol PP, yang perlu diperbaiki. Yang menurutnya harus ditingkatkan yaitu dari sisi kompetensi. Dikatakannya, saat ini jumlah tamatan SD yang mengabdikan di Satpol PP sebanyak 1276 orang, SMP 1726 orang, SLTA 10.180 serta D3 sebanyak 413 orang, S1 sebanyak 1264 orang serta S-2 sebanyak 153 orang.

Pihaknya juga menjanjikan, khusus melakukan monitoring terhadap eksekusi terkait operasional di lapangan para Satpol PP di daerah, untuk kemudian memetakannya dan dapat memberikan masukan yang baik bagi daerah, untuk menurunkan angka bentrokan antara Satpol PP dengan masyarakat yang ditertibkan. "Hal ini perlu, disamping dapat menurunkan angka benturan Pol PP dengan masyarakat, juga daerah merasa dibimbing dan diperhatikan," kata Tarwanto.

Yang tak lupa harus dilakukan oleh Pemda, tambahnya perlunya dilakukan sosialisasi Perda ataupun kebijakan pemda kepada masyarakat secara luas, dengan melibatkan Satpol PP, agar kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah daerah *nyambung* dengan logika berpikir masyarakat.

Semua formula tersebut ditambahkan Tarwanto akan dilakukan secara simultan dan terintegrasi, termasuk penyatuan visi dan misi Satpol PP antara pemerintah pusat dengan daerah, yang akan dibicarakan lebih intensif tiap tahunnya melalui Rakernas.

"Saya memiliki cita-cita bahwa kedepannya Satpol PP harus menjadi komponen Pemda yang profesional dan dicintai oleh masyarakat," kata lelaki tinggi besar ini.

dri/len